

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar adalah sebuah institusi, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli: suatu peristiwa yang berbentuk dan memiliki budaya yang khas yang melibatkan banyak orang dan tindakan serta hubungan sosial, yang membentang pada sejumlah tingkatan (Yulianti, 2011:1). Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (Damsar, 2002: 83). Di dalam pasar, adanya aktivitas yang dilakukan oleh aktor pasar, yaitu salah satunya penjual dan pembeli. Aktivitas yang dilakukan dapat berupa interaksi dalam transaksi jual-beli yang dilakukan, sehingga hal tersebut dapat menciptakan pola hubungan tersendiri.

Dalam bahasa Latin, pasar dapat ditelusuri melalui akar dari kata "mercato", yang bermakna berdagang atau tempat berdagang. Terdapat tiga makna yang berbeda di dalam pengertian tersebut: satu, pasar dalam artian secara fisik; dua, dimaksud sebagai tempat mengumpulkan; tiga, hak atau ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu *market place*. Pada abad ke-16, pengertian pasar, menurut Swedberg seperti yang dikutip Zusemilia (2007:10), "membeli dan menjual secara umum" dan "penjualan (interaksi pertukaran) yang dikontrol *demand* dan *supply*"

(Damsar dan Indrayani, 2009:253). Artian pasar sebagaimana yang dikutip diatas, menunjukkan bahwa pasar lebih sebagai sarana atau tempat berdagang. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan pandangan sosiologi tentang pasar.

Sosiologi memandang pasar sebagai fenomena yang kompleks dengan berbagai macam perangkatnya. Pasar dapat dipandang dari sudut yang beragam misalnya pasar merupakan suatu struktur yang padat dengan jaringan sosial atau yang penuh dengan konflik dan persaingan (Damsar dan Indrayani, 2009:254). Pandangan sosiologi tentang pasar mengarah pada artian yang lebih kompleks. Sosiologi memandang bahwa di dalam pasar terdapat berbagai macam fenomena yang dapat dibahas, tidak hanya memandang bahwa pasar hanya sebagai tempat atau sarana pertukaran antara penjual dengan pembeli saja, namun lebih dari sekedar itu, didalam pasar banyak fenomena yang dapat dikaji.

Berbagai macam fenomena sosial dan berbagai macam pembahasan dapat kita kaji di pasar, salah satunya yaitu menyangkut jaringan sosial yang terdapat di pasar. Pendekatan jaringan sosial melihat pasar sebagai suatu struktur hubungan antara beberapa aktor pasar seperti perusahaan, pesaing pemasok (rekanan), distributor, pelanggan, pembeli dan seterusnya (Damsar, 16 : 2005). Jaringan tersebut merupakan ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan, boleh dalam bentuk strategik, boleh pula dalam bentuk moralistik. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak (Lawang, 2005 : 62). Dapat dilihat

bahwa dalam sebuah jaringan sosial yang terbentuk, sangat dibutuhkan aspek kepercayaan dan norma yang dapat mengatur hubungan tersebut.

Ulasan di atas mengindikasikan, idealnya pasar mestilah terintegralistik. Terdiri dari bagian-bagian yang berfungsi serta bekerja dalam sebuah ritme kesatuan. Namun, banyak terdapat kasus-kasus pasar, dalam pengertian ruang, bagian-bagiannya tidak terintegralistik. Seperti halnya pasar Banto di Bukittinggi. Pembangunan pasar Banto belum berfungsi secara optimal karena hal yang terjadi adalah pertokoan masih sepi pedagang. Selain itu, kasus pembangunan lantai dua pasar Bandar Buat di Padang yang diperuntukkan pedagang kaki lima juga belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang serupa juga terjadi di pasar Sawahlunto. Dimana, pasar Sawahlunto merupakan salah satu titik yang dibenahi Pemerintah Kota Sawahlunto terkait gencarnya program pembangunan yang tengah dilakukan Pemerintah Kota dalam rangka mempromosikan program wisatanya. Namun, kenyataan yang terjadi adalah pasar Sawahlunto belum berfungsi secara optimal sama seperti halnya keberadaan pasar Banto dan pasar Bandar Buat.

Pasar Sawahlunto terletak di Kecamatan Lembah Segar, merupakan salah satu sentral dari Kota Sawahlunto dan juga merupakan pusat dari aktivitas ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto. Pasar tersebut merupakan pasar tradisional yang



aktivitas perdagangan pada umumnya didominasi oleh pedagang kecil yang memanfaatkan fasilitas pasar seperti toko, kios, los, ataupun kaki lima.

Sesuai dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 10 (2) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut juga termasuk dalam pengelolaan pasar Sawahlunto. Dimana, dalam pengelolaan pasar Sawahlunto, Pemerintah memiliki wewenang tersendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah seperti yang dibunyikan dalam UU No. 32 tahun 2004 tersebut.

Pengelolaan pasar Sawahlunto dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Hal ini dijelaskan dalam Perda Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar. Dalam hal ini, Dinas Pertambangan Industri Perdagangan Koperasi Dan Tenaga Kerja atau biasa disebut dengan Dinas Perindagkopnaker Sawahlunto sebagai badan Pengelola pasar. Namun adanya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kota Sawahlunto yang bekerja dibawah naungan Dinas Perindagkopnaker Sawahlunto, sebagai badan yang secara langsung terjun dalam pengelolaan pasar.

Di pasar Sawahlunto, terdapat pula kepengurusan persatuan pedagang pasar Sawahlunto yang biasa disebut sebagai Pengurus Pasar. Badan ini terdiri dari beberapa pedagang yang ada di pasar Sawahlunto dan merupakan perwakilan ratusan pedagang yang ada di pasar Sawahlunto yang tugasnya yaitu untuk menjembatani hubungan antara ratusan pedagang dengan dengan Pemerintah.

Terkait dengan gencarnya program pembangunan untuk menjadikan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata, maka rehabilitasi atau pembenahan pasar Kota Sawahlunto merupakan salah satu program Pemerintah Kota untuk mendukung pariwisata yang ada di Kota Sawahlunto. Oleh karena itu, Pemerintah Kota telah merahabilitasi pasar Sawahlunto yang awalnya merupakan pasar tradisional menjadi pasar semi modern. Proyek rehabilitasi pasar Blok B dan Blok C Kota Sawahlunto yang dilaksanakan semasa kepemimpinan Walikota Amran Nur dengan pinjaman *World Bank* dan dikerjakan oleh PT. Nindya Karya (Persero) dengan pengawas PT. *Second Dwi Tunggal Putra* mulai dikerjakan sekitar tahun 2010. Sembari berlangsungnya rehabilitasi gedung pasar dari pasar tradisional menjadi pasar semi modern, area atau lokasi pasar sebagian dipindahkan sementara ke daerah Kampung Teleng.

Pembagian toko kepada pemilik toko (pemegang Izin Menempati Kedai) dilakukan setelah selasainya pembangunan gedung baru pasar Sawahlunto pada awal 2013, dilakukan dengan cara membentuk tim khusus dari Pemerintah. Sehingga para pedagang atau pemegang izin menempati kedai (IMK) tidak bisa menghendaki yang mana toko yang diinginkan. Namun sebelumnya, pembagian petak toko kepada

pemegang IMK dilakukan oleh Pengurus Pasar. Karena beberapa hal yang terjadi, wewenang pembagian toko yang dimiliki Pengurus Pasar diserahkan kembali pada Pemerintah.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan dengan banyak pihak, keberadaan Pengurus Pasar saat ini tidak seperti sebelumnya. Jika sebelum selesainya rehabilitasi pasar Sawahlunto, Pengurus Pasar merupakan badan yang aktif menjembatani pedagang dan Pemerintah, dan juga merupakan badan yang membantu Pemerintah dalam menjalankan beberapa tugas, lain halnya dengan keadaan setelah penempatan pasar yang telah diperbarui. Badan Pengurus Pasar menjadi tidak seaktif dulu hingga saat ini.

Dilain sisi, observasi yang peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa pasar Sawahlunto yang telah diperbarui ini belum berfungsi secara optimal. Karena hal yang terjadi adalah toko yang ada masih banyak yang tutup atau tidak dioperasikan oleh pemegang IMK atau yang biasa disebut pemilik toko. Padahal, sudah lebih dari dua tahun pasca peresmian pasca rehabilitasi gedung pasar, namun masih banyak pemegang IMK yang tidak mengoperasikan tokonya di pasar yang telah diperbarui dengan kondisi pasar yang jauh lebih baik dari pasar Sawahlunto sebelumnya. Pada tabel 1.1 akan dipaparkan jumlah toko yang belum dioperasikan oleh pemilik.



Tabel 1.1
Jumlah Toko Di Pasar Sawahlunto

Area Pasar	Jumlah Toko	Jumlah Toko yang Belum Dioperasikan	Persentasi Toko yang Belum Dioperasikan
Blok B	92	50	54,3%
Blok C	220	57	25,9%
Total	312	107	34%

Sumber: Data sekunder UPTD Pasar Sawahlunto Tahun 2015

Dari kegiatan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa banyaknya toko yang tidak dioperasikan oleh pemiliknya, yakni sekitar 107 petak toko terjadi semenjak peresmian dan penempatan pasar Sawahlunto pasca rehabilitasi. Hal ini erat kaitannya dengan hasil pembagian toko yang diterima oleh pemegang IMK atau pemilik toko dan dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

Pemberian surat peringatan dan teguran kepada pemilik toko atau pemegang IMK oleh Pemerintah sudah dilakukan beberapa kali. Pemberian surat peringatan ini dilakukan sebanyak satu kali, dan setelah itu diiringi dengan pengiriman surat teguran sebanyak tiga kali. Pengiriman surat peringatan dan teguran dilakukan dari pertengahan tahun 2014 hingga akhir tahun 2014 dengan rentang waktu pengiriman rata-rata satu bulan. Hal ini dilaksanakan mengingat banyaknya toko yang belum dioperasikan oleh pemilik toko dan hal tersebut menyebabkan kerugian di banyak pihak.

Hal ini juga diungkapkan di berita *online* Antaranews.com yang terbit pada tanggal 18 April 2015. Dalam berita tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto mengutamakan langkah pendekatan secara persuasif untuk mengatasi masalah belum ditempatinya petak toko dan kedai di kawasan pasar Sawahlunto blok B dan C.

Merenggangnya hubungan antara Pemegang IMK atau pemilik toko terhadap Pemerintah serta Pengurus Pasar semenjak pembagain toko yang dilakukan menyebabkan melemahnya kapital sosial dalam pengelolaan pasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa pihak yang terlibat didalam jaringan tersebut merasa tidak diuntungkan dalam hubungan.

Melihat keadaan hubungan antara Pemerintah, Pengurus Pasar, serta pemegang IMK atau yang biasa disebut pemilik toko sekarang yang tidak seperti hubungan sebelum penempatan pasar, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Melemahnya kapital sosial UPTD Pasar Sawahlunto dalam mengelola pasar Sawahlunto Pasca Rehabilitasi”.



1.2 Perumusan Masalah

Pengelolaan pasar Sawahlunto dilakukan oleh Pemerintah Sawahlunto. Dalam beberapa hal, Pemerintah melibatkan Pengurus Pasar sebagai badan yang mengayomi ratusan pedagang di pasar Sawahlunto.

Dalam hal rehabilitasi gedung pasar Sawahlunto yang dilaksanakan sekitar tahun 2009/2010, Pemerintah melaksanakan program rehabilitasi gedung pasar

karena melihat kondisi sarana dan prasarana Kota Sawahlunto tidak sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk, untuk menjamin kepastian bagi pedagang sektor informal yang saat ini menjadi sumber kesembrautan lokasi pasar dan pusat kota, menunjang ekonomi daerah, serta diharapkan dapat menunjang pariwisata sesuai dengan visi dan misi kota Sawahlunto.

Tapi kenyataan yang ada tidak sejalan dengan yang diharapkan. Pasalnya, setelah dua tahun lebih pasca peresmian pasar Sawahlunto beroperasi, hingga saat ini terdapat 107 toko yang tidak dioperasikan oleh pemiliknya, padahal kondisi pasar yang sekarang jauh lebih bagus, rapi, bersih dan lengkap sarana serta prasarananya.

Hal ini erat kaitannya dengan kekecewaan pemegang IMK terhadap pembagian toko yang dilaksanakan sebelumnya. Pemegang IMK atau yang biasa disebut pemilik toko merasa kurang diuntungkan dalam pembagian toko tersebut sehingga lebih memilih untuk tidak mengoperasikan tokonya hingga saat ini.

Dalam kasus tersebut, adanya jaringan sosial yang terganggu antara pemilik toko atau pemegang IMK dengan Pemerintah dan Pengurus. Jaringan tersebut terganggu karena kekecewaan yang dirasakan pemilik toko atau pemegang IMK atas penempatan toko yang mereka dapat, yang diperoleh dari hasil pembagian toko yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan sebelumnya pembagian ini dilakukan oleh Pengurus Pasar. Pemegang IMK merasa, pembagian toko yang dilakukan Pemerintah dan Pengurus Pasar sebelumnya, kurang menguntungkan. Hal tersebut berdampak pada melemahnya kapital sosial yang terbangun sebelumnya.



Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian “*Apa penyebab lemahnya kapital sosial dalam pengelolaan pasar Sawahlunto?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Tujuan Umum:

Mendeskripsikan kapital sosial dalam pengelolaan pasar Sawahlunto pasca rehabilitasi

Tujuan Khusus:

Untuk mendeskripsikan pelemah kapital sosial dalam pengelolaan pasar

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Aspek Akademis

Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial yaitu ilmu sosiologi ekonomi dan sosiologi pasar.

Bagi Aspek Praktis

- Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan yang berhubungan dengan ilmu



sosial yaitu ilmu sosiologi, dikhususkan dalam bidang sosiologi ekonomi dan sosiologi pasar.

- Bahan informasi dan pedoman serta sebagai acuan bagi Pemerintah untuk membangun kebijakan atau solusi atas persoalan yang tengah ada.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Konsep Pasar

Geertz (1973) dalam Damsar dan Indrayani (2009:253), mencoba menelusuri pengertian pasar sebagai kata serapan dari bahasa Parsi, yaitu *bazar*, lewat bahasa Arab bermakna suatu pranata ekonomi dan sekaligus cara hidup, suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dari masyarakat, dan suatu dunia sosial-budaya yang lengkap dalam sendirinya. Jadi dalam pandangan Geertz, merupakan gejala alami dan gejala kebudayaan, dimana keseluruhan dari kehidupan masyarakat pendukungnya dibentuk oleh pasar.

Dalam ekonomi klasik, Adam Smith, melihat pasar sinonim dengan baik tempat jualan (*market place*) maupun sebagai suatu daerah geografis. Sedangkan ekonom yang datang kemudian seperti Alfred Marshal melihat pasar sebagai suatu mekanisme dalam penciptaan harga (Damsar dan Indrayani, 2009:254).

Pasar adalah institusi yang memungkinkan terjadinya pertukaran melalui tawar-menawar atau pelelangan. Institusi ini memainkan peran krusial dalam

mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan penghasilan di hampir semua perekonomian dan juga membantu menentukan distribusi pengaruh politik, sosial dan intelektual (Kuper dan Kuper, 2000:609).

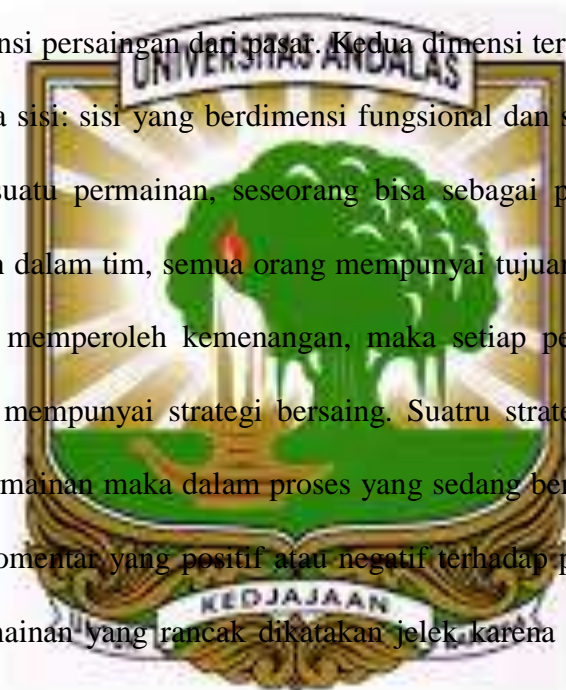
Sosiologi memandang pasar sebagai fenomena yang kompleks dengan berbagai macam perangkatnya. Pasar dapat dipandang dari sudut yang beragam misalnya pasar merupakan suatu struktur yang padat dengan jaringan sosial atau yang penuh dengan konflik dan persaingan (Damsar dan Indrayani, 2009:254).

Pemanfaatan, penggunaan, dan permainan terhadap aspek ruang dan waktu menjadi salah satu hal yang menarik dalam mengkaji tentang pasar. Pandangan mengenai ruang dalam aspek sosiologis dalam pemikiran Henri Levebvre yang menyatakan bahwa pengorganisasian ruang membuat perbedaan bagaimana masyarakat dapat berkembang, telah membentuk basis bagi pendekatan kepada interseksi antara hubungan sosial dengan ruang. Doreen Massey meyakini bentuk ruang sosial sebagai “efektivitas kausal”. Sebagai “sebuah momen di dalam interseksi hubungan-hubungan sosial yang tertera,” ruang dibentuk di luar kompleksitas jaringan hubungan mulai dari skala yang paling global hingga yang paling lokal. Hal ini memperlihatkan konsepsi relasional di mana “tempat” merupakan titik pertemuan di dalam jaringan hubungan yang memiliki karakter tidak stabil dan tidak terikat (Scott, 2011:291-292).

Sosiologi pasar, memandang bahwa pemanfaatan dan penggunaan ruang bagi aktor ekonomi terutama ditujukan kepada fungsi ekonominya –disamping juga dapat

diselimuti oleh aspek lain seperti politik, sosial budaya dan seterusnya (Damsar, 2005:22). Dalam pemanfaatan dan penggunaan aspek ruang, lokasi pasar tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi bagi penjual dan pembeli tetapi ia juga dapat mengemban fungsi rekreasi dan komunikasi (Damsar, 2005:23).

Pemanfaatan dan penggunaan aspek ruang dan waktu berarti berkaitan dengan dimensi fungsional dari pasar. Sedangkan permainan aspek waktu dan ruang menunjuk pada dimensi persaingan dari pasar. Kedua dimensi tersebut bagaikan mata uang yang punya dua sisi: sisi yang berdimensi fungsional dan sisi yang berdimensi persaingan. Dalam suatu permainan, seseorang bisa sebagai pemain tunggal atau dapat sebagai pemain dalam tim, semua orang mempunyai tujuan untuk memperoleh kemenangan. Untuk memperoleh kemenangan, maka setiap pemain (baik tunggal maupun dalam tim) mempunyai strategi bersaing. Suatu strategi bersaing apabila diterapkan dalam permainan maka dalam proses yang sedang berlangsung orang lain dapat memberikan komentar yang positif atau negatif terhadap permainan tersebut. Bisa saja suatu permainan yang rancak dikatakan jelek karena komentator tersebut berada pada pihak yang dikalahkan dalam permainan. Atau sebaliknya suatu permainan yang kotor dikomentari sebagai yang rancak. Dalam dunia permainan, seorang komentator sulit dipercayai keobyektifan dari penilaiannya selagi ia mempunyai kepentingan. Bukan tidak jarang terjadi suatu media massa mengomentari suatu permainan rancak ketika media massa tersebut berada pada pihak yang sedang diuntungkan dan akan berbalik kata ketika media massa tersebut berada di pihak yang



dikalahkan misalnya dilarang terbit. Ini juga merupakan bagian dari dimensi permainan (Damsar, 2005:97-98).

1.5.2 Aktor Pasar

Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi yang menggerakkan kehidupan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh aktor-aktor pasar (Damsar, 2005:95).

Dalam Damsar (2005:107-113), terdapatnya pembagian aktor pasar retail Indonesia yang terdiri dari pedagang, pembeli, dan organisator pasar.

a. Pedagang

Pedagang retail adalah pedagang yang menjual produk langsung ke konsumen. Di Indonesia pedagang retail dapat dibagi menjadi pedagang retail besar, menengah, dan kecil.

b. Pembeli

Seperti halnya pedagang, pembeli juga beragam, ia terdiri dari beberapa tipe yaitu pengunjung, pembeli, dan pedagang.

c. Organisator Pasar

- Pemerintah

Pemerintah biasanya berfungsi pada pasar-pasar yang didirikan oleh pemerintah sendiri, misalnya pasar inpres, pasar tradisional dan seterusnya. Pasar ini dikelola oleh Dinas Pasar dari struktur



pemerintahan tertentu, misalnya kabupaten dan kotamadya. Dalam struktur pasar jenis ini selain terdapat pengurus pasaryang merupakan bahagian dari tugas Pegawai Negeri juga terdapat pegawai lepas atau harian misalnya pemungut retribusi, petugas keamanan pasar, dan seterusnya.

- Bukan Pemerintah

Pada daerah tertentu juga terdapat pasar yang secara sosio-kultural merupakan bahagian dari masyarakat misalnya pasar Minangkabau. Pasar tersebut diorganisasi oleh suatu nagari. Struktur pengelolaan dan penamaannya dikaitkan dengan tradisi yang dimiliki sepertipanghulu pasa, mantri pasa, dan seterusnya.

- Swasta

Pasar yang dibangun swasta biasanya terdapat di kota-kota besar seperti di Jakarta. Pasar tersebut dikelola secara swadaya mulai dari aspek keamanan sampai pada pengembangan pasar tersebut. pasar jenis ini biasanya terdapat diperumahan elit. Pasar swalayan dapat dimasukkan dalam tipe organisasi pasar ini.

1.5.3 Konsep Birokrasi

Pemerintah dengan seluruh jajarannya yang secara populer dikenal dengan istilah birokrasi, memegang peranan yang dominan dalam mengambil langkah-



langkah guna mewujudkan proses administrasi negara sebagai wahana mencapai tujuan nasional (Masyudi, 2005:47).

Birokrasi adalah organisasi besar, mengusung misi berskala besar, dikerjakan oleh banyak orang/pesonil/pegawai. Birokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan dari/ dikantor, bukan dari/di jalanan, bukan dari/di sawah atau dari/di medan perang. Jadi birokrasi adalah pemerintahan atau pengelolaan masyarakat secara tertulis, terencana, terdokumentasi secara rapi dan dilakuka oleh orang-orang terdidik dan atau alias beradap (Samin, 2011:172).

Kamus Akademi Perancis memasukkan kata demokrasi dalam suplemennya pada tahun 1798 dan mengartikannya sebagai: Kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintahan. Kamus Bahasa Jerman edisi 1813, mendefinisikan birokrasi sebagai: Wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan untuk diri mereka sendiri atas sesama warga negara. Kamus teknis bahasa Italia terbit 1828 menunjukkan demikian: Suatu kata baru, yang artinya kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan (Albrow, 1989:3).



Kerangka pemikiran Weber tentang birokrasi dapat ditemukan dalam ide-idenya tentang kekuasaan, dominasi dan kewenangan. Tipologi kewenangan yang dibuat Weber dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan klasifikasi terhadap berbagai jenis organisasi. Kewenangan tradisional adalah landasan dari organisasi tradisional. Kewenangan kharismatik adalah landasan dari organisasi yang berbentuk

gerakan-gerakan karismatik. Selanjutnya kewenangan legal-rasional adalah landasan dari birokrasi (Etzioni, 2011:42).

Dalam Etzioni (2011:42-44), dijelaskan mengenai ciri-ciri birokrasi oleh Weber sebagai berikut:

- a. Tiap-tiap posisi atau jabatan memiliki bidang kompetensi tersendiri yang tugas-tugasnya dibedakan secara tegas dari jabatan lain.
- b. Jabatan disusun dalam hierarki dimana jabatan yang lebih rendah disupervis/diawasi oleh jabatan yang lebih tinggi sementara jabatan yang lebih tinggi bertanggung jawab atas kinerja dari jabatan yang lebih rendah.
- c. Kewenangan diberi hanya untuk tugas-tugas yang bersifat resmi saja. Diluar tugas resmi ini, seorang bawahan tidak lagi tunduk pada atasannya. Ada pemisahan secara total antara kegiatan resmi dari kehidupan pribadi.
- d. Para pejabat duduk dijabatannya karena diangkat/ditunjuk dan buka lewat pemilu dan mereka duduk disitu berdasarkan hubungan kontrak antara diri mereka dengan organisasi.
- e. Para pejabat dipilih secara kualifikasi objektif, dimana kualifikasi ini bisa didapatkan para pejabat lewat pelatihan, yang kemudian dibuktikan lewat ujian/tes, lewat ijazah atau keduanya.
- f. Pejabat bekerja demi karier. Mereka dilindungi agar tidak mengalami pemecatan secara sewenang-wenang dan bisa memegang jabatannya secara permanen. Promosi dilakukan secara senioritas, prestasi atau keduanya.



- g. Para pejabat dipisahkan dari sarana administrasi yang mengatur jabatan itu sehingga jabatan itu tidak bisa menjadi milik pribadi mereka.
- h. Kegiatan-kegiatan dalam birokrasi diatur oleh aturan-aturan yang bersifat umum, konsisten dan abstrak. Karena aturan-aturan ini harus berifat umum, maka perlu dilakukan kategorisasi terhadap berbagai kemungkinan kasus yang bisa terjadi berdasarkan kriteria yang objektif.
- i. Tugas-tugas resmi dilakukan secara impersonal tanpa ada kebencian tapi juga tidak ada simpati secara pribadi dari pejabat yang melaksanakannya.
- j. Birokrasi sering kali dikepalai oleh orang yang bukan bagian dari birokrasi (yaitu dikepalai oleh orang yang dipilih lewat pemilu). Para birokrat menjalankan aturan tapi pimpinan birokrasi inilah yang membuat aturan-aturan itu. Jika birokrat selalu diangkat ke jabatan yang didudukinya, maka pimpinan birokrasi ini biasanya mendapatkan posisi itu karena warisan, karena ia merebutnya secara paksa atau karena dia dipilih lewat pemilu.



1.5.4 Kajian Sosiologis

Penelitian ini memakai konsep kapital sosial. Menurut James Coleman dalam Damsar dan Indrayani (2009:209-210), member batasan kapital sosial sebagai “seperangkat sumber daya yang inheren dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial seorang anak”. Coleman menambahkan bahwa kapital sosial merupakan “aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial”.

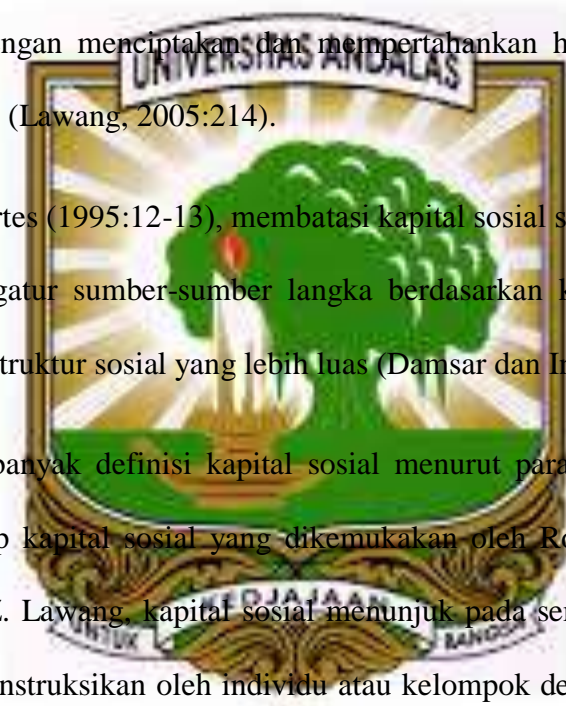
Menurut Putnam, “kapital sosial menunjuk pada bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang meningkatkan efisiensi masyarakat dalam memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi” (Lawang, 2005:212).

Jonathan H. Turner mengatakan bahwa kapital sosial menunjuk pada kekuatan-kekuatan yang meningkatkan potensi untuk perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat dengan menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dan pola organisasi sosial (Lawang, 2005:214).

Alejandro Portes (1995:12-13), membatasi kapital sosial sebagai “kemampuan individu untuk mengatur sumber-sumber langka berdasarkan keanggotaan mereka dalam jaringan atau struktur sosial yang lebih luas (Damsar dan Indrayani, 2009:210).

Dari sekian banyak definisi kapital sosial menurut para ahli, penelitian ini menggunakan konsep kapital sosial yang dikemukakan oleh Robert M.Z. Lawang. Menurut Robert M.Z. Lawang, kapital sosial menunjuk pada semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital-kapital lainnya (Lawang, 2005:217).

Definisi ini perlu dirinci perkomponen menurut perspektif sosiologi (Lawang, 2005:217-218):



- Kekuatan sosial menunjuk pada semua mekanisme yang sudah dan akan dikembangkan oleh suatu komunitas dalam mempertahankan hidupnya. Yang menyusun kekuatan itu adalah individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari yang digunakannya untuk mengatasi semua masalah sosial yang dihadapi.
- Kekuatan-kekuatan sosial sebagai kapital sosial dapat terbatas pada komunitas itu saja yang dilihat sebagai “*bounded social capital*”, atau kalau sudah dikaitkan dalam bentuk jaringan dengan kapital sosial mezo dan makro dapat disebut sebagai “*brindging social capital*”. Kalau satuan pengamatan dan analisisnya adalah mezo sebagai “*bounded*”, maka yang makro adalah “*brindging*”.
- Kapital sosial itu pada dasarnya merupakan konstruksi sosial. Artinya, melalui interaksi sosial individu-individu membangun kekuatan sosial (kolektif) bersama untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi. Dalam membangun kekuatan bersama ini, prinsip kegunaan memegang peranan penting, mulai dari yang paling menguntungkan menurut penilaian individu, sampai dengan yang paling kurang. Karena kapital sosial merupakan konstruksi sosial yang pada dasarnya bersifat utilitaristik, maka ada unsur kewajiban, norma dan sanksi di dalamnya.
- Kapital sosial dalam pengertian ini merupakan alat yang dikonstruksikan oleh individu-individu dalam mencapai tujuan bersama.



- Ada kemungkinan kapital sosial dominan dalam mengatasi suatu masalah sosial. Tetapi mungkin juga tidak seberapa pentingnya. Namun prinsip sinergi tetap berlaku agar kapital sosial dapat digunakan sebagai kekuatan sosial untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun konsep-konsep inti dari kapital sosial menurut Robert M.Z. Lawang terdiri dari kepercayaan, norma dan jaringan. Sedangkan konsep tambahan terdiri dari tindakan sosial, interaksi sosial, dan sikap, yang akan dijelaskan sebagai berikut (Lawang, 2005:45-72):

1. Kepercayaan

Inti kepercayaan antar manusia ada tiga hal yang saling terkait : (i) Hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Termasuk dalam hubungan ini adalah institusi, yang dalam pengertian ini diwakili orang. Seseorang percaya pada institusi tertentu untuk kepentingannya, karena orang-orang dalam institusi itu bertindak. (ii) Harapan yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak (harapan menguntungkan kedua belah pihak). (iii) Interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud.

Dengan ketiga dasar tersebut, kepercayaan yang dimaksudkan disini menunjuk pada hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial. Hubungan sosial yang dimaksud yaitu menyangkut struktur sosial. Harapan yang ada pada



seseorang bisa terbentang mulai dari yang paling kurang mengharapkan dan sangat mengharapkan.

2. Jaringan

Jaringan dan fungsinya terhadap pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari kepercayaan. Menurut Lawang, konsep jaringan yang digunakan dalam teori kapital sosial sebagai berikut:

- Ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan, boleh dalam bentuk strategik, boleh juga dalam bentuk moralistik. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak.
- Ada kerja antar simpul (orang atau kelompok) yang melalui hubungan sosial menjadi satu kerjasama, bukan kerja bersama-sama. Kepercayaan simbolitik bilateral dan kepercayaan interpersonal masuk dalam kategori ini.
- Seperti halnya sebuah jaring (yang tidak putus) kerja yang terjalin antar simpul itu pasti kuat menahan beban bersama, dan malah dapat “menangkap ikan” lebih banyak.
- Dalam kerja jaringan itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Ketika satu simpul putus, maka keseluruhan jaringan itu tidak bisa berfungsi lagi hingga simpul tersebut diperbaiki. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat.



- Media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan, atau antara orang-orang dan hubungannya tidak dapat dipisahkan.
- Ikatan atau pengikat (simpul) dalam kapital sosial adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan mediannya itu dipelihara dan dipertahankan.

Jaringan masuk dalam kepercayaan strategik. Artinya, melalui jaringan orang saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, saling bantu dalam melaksanakan atau mengatasi suatu masalah. Jaringan adalah sumber pengetahuan yang menjadi dasar utama dalam pembentukan kepercayaan strategik.

Seseorang tidak membuka jaringan dengan siapa saja, melainkan hanya dengan orang-orang yang menurut penilaiannya mempunyai arti bagi dirinya, baik secara sosial maupun ekonomik. Pola hubungan seperti ini berlangsung dalam prinsip pertukaran sosial. Jika hubungan itu menguntungkan akan diteruskan, tetapi jika salah satunya merasa dirugikan sekali, hubungan itu akan terputus (Homan).

Jaringan sosial apapun harus diukur dengan fungsi ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial sekaligus. Fungsi ekonomi menunjuk pada produktivitas, efisiensi dan efektifitas yang tinggi, sedangkan fungsi sosial menunjuk pada dampak partisipatif, kebersamaan yang diperoleh dari suatu pertumbuhan ekonomi. Jaringan sosial seperti itu sajalah yang disebut sebagai kapital sosial. Jaringan sosial harus



memiliki sifat keterbukaan pada semua orang untuk memberikan kesempatan kepada publik menilai fungsinya yang mendukung kepentingan umum.

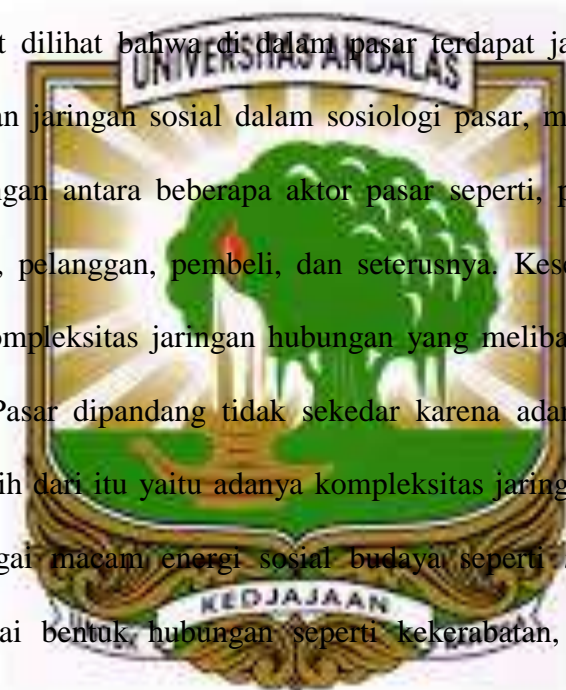
3. Norma

Norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Jika struktur jaringan terbentuk karena pertukaran sosial yang terjadi antara dua orang, sifat norma kurang lebih sebagai berikut:

- 
- Norma itu muncul dari pertukaran yang menguntungkan (Blau 1963, Fukuyama 1999). Jika dalam pertukaran itu keuntungan hanya dinikmati oleh salah satu pihak, pertukaran sosial selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Jika dalam pertukaran pertama keduanya saling menguntungkan, akan muncul pertukaran yang kedua, dengan harapan akan memperoleh keuntungan pula (Homans 1974). Jika beberapa kali pertukaran prinsip saling menguntungkan dipegang teguh, dari situlah muncul norma dalam bentuk kewajiban sosial, yang intinya membuat kedua belah pihak merasa diuntungkan dari pertukaran itu. Dengan cara demikian hubungan pertukaran itu dipelihara (Blau).
 - Norma bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu.
 - Jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata, akan memunculkan norma keadilan.

Norma sosial merupakan sekumpulan aturan yang harus dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Oleh karena itu norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial (Inayah, 2012:45)

Jika dihubungkan dengan konsep-konsep inti kapital sosial menurut Robert M.Z. Lawang, maka dapat dilihat bahwa di dalam pasar terdapat jaringan yang sangat kompleks. Pendekatan jaringan sosial dalam sosiologi pasar, melihat pasar sebagai suatu struktur hubungan antara beberapa aktor pasar seperti, perusahaan, pesaing, pemasok, distributor, pelanggan, pembeli, dan seterusnya. Kesemua aktor tersebut membentuk suatu kompleksitas jaringan hubungan yang melibatkan kapital budaya dan kapital sosial. Pasar dipandang tidak sekedar karena adanya permintaan dan penawaran tetapi lebih dari itu yaitu adanya kompleksitas jaringan aktor pasar yang menggunakan berbagai macam energi sosial budaya seperti *trust* (kepercayaan), *clientization*, berbagai bentuk hubungan seperti kekerabatan, suku, daerah asal, almamater, dan seterusnya (Damsar, 2005:16-17).



Yang menjadi sorotan disini yaitu menyangkut kapital sosial dalam pengelolaan pasar. Dalam kapital sosial, adanya tiga unsur penting yaitu kepercayaan, jaringan dan norma. Dalam hal pengelolaan pasar Sawahlunto, adanya jaringan sosial yang terbentuk antara pemilik toko dengan Pemerintah serta Pengurus Pasar yang di dalamnya mengandung harapan yang menguntungkan antar pihak yang terlibat dalam

jaringan tersebut, merupakan landasan konsep kepercayaan yang diungkapkan oleh Lawang (Lawang, 2005:46). Norma yang ada dalam jaringan tersebut bersifat resiprosikal, yang berarti norma tersebut menyangkut hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Lawang, 2005:70).

1.5.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yulfa Fransiska (2008) mengenai Kapital Sosial Dalam Masyarakat Nelayan di Kanagarian Paiman Kecamatan IV Jurai menceritakan kapital sosial yang terbangun dalam masyarakat nelayan berdasarkan hubungan sosial, kerja sama, dan berlangsung terus menerus. Kapital sosial yang terbangun berbentuk kepercayaan, jaringan sosial, dan norma. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa proses terbantuknya kepercayaan dan jaringan dalam masyarakat nelayan disebabkan karena adanya hubungan sosial dan kerja sama diantara hubungan masyarakat tersebut. Sedangkan bentuk jaringan dalam masyarakat nelayan adalah bentuk jaringan sosial horizontal dan jaringan sosial vertikal. Jaringan ini dibentuk berdasar hubungan sosial, kerjasama, kepercayaan dan tolong menolong. Jaringan ini berfungsi untuk mengatasi kasulitan hidup pada saat musim penceklik. Sedangkan bentuk norma yang ada adalah norma agama dan norma adat. Norma ini berfungsi untuk mengontrol perilaku nelayan.

Perbedaan dengan penelitian tersebut, jika penelitian yang dilakukan oleh Yulfa Fransiska menyoroti mengenai berfungsinya kapital sosial dalam kehidupan

masyarakat nelayan, penelitian mengenai melemahnya kapital sosial dalam pengelolaan pasar Sawahlunto menyoroti mengenai bagaimana melemahnya kapital sosial yang telah terbangun sebelumnya di pasar Sawahlunto.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Erdian pada tahun 2011 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi Mengenai Pembangunan Pusat Pertokoan Dan Gedung Parkir Pasar Banto Bukittinggi”, dimana dalam penelitian ini yang menjadi sorotan adalah implementasi kebijakan pembangunan pasar Banto Bukittinggi yang masih sekitar 75% dari keseluruhan tokonya belum terisi. Dimana, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa, pembangunan pasar Banto Bukittinggi tidak dapat mencapai sasaran dan tujuan kebijakan.

Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, jika penelitian yang terdahulu menyoroti mengenai permasalahan dari segi implementasi kebijakan, penelitian mengenai melemahnya kapital sosial dalam pengelolaan pasar memfokuskan kajian pada bentuk kapital sosial yang terbangun dalam pengelolaan pasar serta pelemahan kapital sosial dalam pengelolaan pasar yang terjadi semenjak selesainya proyek rehabilitasi pasar Sawahlunto.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tissa Septiadhana (2015), mengenai kendala yang dihadapi UPTD dalam pengelolaan pasar Bandar Buat yang telah diperbarui enggan ditempati oleh pedagang. Lantai dua pasan Bandar Buat diperuntukkan bagi pedagang kaki lima, namun para pedagang enggan menempatinnya. Pedagang lebih

senang berdagang ditempat sebelumnya yaitu di pinggir jalan sehingga hal tersebut membuat jalan menjadi sangat macet, sempit, dan juga meresahkan pejalan kaki. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak UPTD pasar dalam pengelolaan pasar Bandar Buat yaitu menyangkut status kepemilikan lahan pasar yang belum jelas, sehingga pedagang setempat tidak mau pindah kelantai dua karena mereka merasa lahan pasar itu milik penduduk sehingga mereka memiliki hak untuk berdagang disana. Kendala yang kedua yaitu menyangkut fasilitas pendukung yang ada di pasar Bandar Buat sangatlah minim seperti tidak memiliki mushalla, kamar mandi, payung-payung, dan pengairan yang memadai, sehingga hal tersebut membuat pedagang enggan membuka lapak di lantai dua. Kendala yang ketiga yaitu menyangkut kepentingan pribadi. Pedagang merasa mempunyai relasi yang cukup kuat jika digusur dari tempat berdagangnya di pinggir jalan, sehingga mereka tidak merasa takut untuk berdagang di pinggir jalan.

Perbedaan dengan penelitian tersebut, jika faktor pedagang enggan berdagang di lantai dua pasar Bandar Buat karena fasilitas atau sarana dan prasarana yang disediakan kurang memadai, hal tersebut berbeda dengan kondisi di pasar Sawahlunto. Pasar Sawahlunto yang telah diperbarui memiliki sarana dan prasarana yang jauh lebih memadai dibanding pasar Bandar Buat.



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penjelasan Afrizal (2014:13) mengenai definisi metode penelitian kualitatif yaitu, metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Metode ini dipilih karena lebih mampu menemukan definisi situasi dan gejala sosial dari subjek, perilaku, motif-motif subjek, perasaan dan emosi orang yang diamati, merupakan definisi situasi subjek yang diteliti. Maka subjek akan dapat diteliti secara langsung. Selain itu metode ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang pemikiran atau penilaian pedagang atau pemegang IMK terhadap hasil pembagian toko yang diterimanya, karena hal tersebut berkaitan dengan alasan mereka tidak membuka tokonya. Selain itu, peneliti juga dapat mengetahui landasan dari pembagian toko baik yang dilakukan Pemerintah dan juga yang dilakukan Pengurus Pasar.



Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu keadaan melalui data yang diperoleh di lapangan. Laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen resmi lainnya (Moleong, 2013:11). Penggunaan tipe penelitian deskriptif menggambarkan pelemah kapital sosial dalam pengelolaan pasar Sawahlunto yang dirinci dengan mendeskripsikan bentuk kepercayaan, jaringan serta norma yang ada di pasar Sawahlunto.

1.6.2 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Infoman penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139). Pemilihan informan penelitian bertujuan untuk menjangkau sebanyak-banyaknya data dan informasi yang bermanfaat bagi bahan penelitian nantinya. Oleh sebab itu yang menjadi informan penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar paham segala situasi, kondisi lokasi penelitian dan menguasai penelitian ini. Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai informan adalah pedagang atau pemegang IMK yang tidak mengoperasikan tokonya, Pemerintah yang terkait seperti pihak Dinas Perindagkopnaker dan UPTD pasar, serta Pengurus Pasar.



Pengambilan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* (sengaja). *Purposive sampling* adalah penarikan informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Artinya, sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi (Afriзал, 2014:140). Peneliti menetapkan sendiri informan penelitiannya sebagai sumber data berdasarkan kriteria yang harus terpenuhi dan peneliti sebelumnya harus terlebih dahulu mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dan prinsip kualitatif, dimana jumlah informan tidak ditentukan sejak dimulai penelitian tetapi setelah penelitian selesai pengambilan data dihentikan jika variasi informan yang telah dikumpulkan dari lapangan penelitian dan data-data atau informasi yang diperoleh melalui analisis yang cermat, sudah menggambarkan pola dari permasalahan yang diteliti.



Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang, yang terdiri dari 7 orang pemegang IMK yang tidak mengoperasikan tokonya, 4 orang Pengurus Pasar, 3 orang pihak UPTD Pasar dan 1 orang dari pihak Perindagkopnaker Kota Sawahlunto.

1.6.3 Data yang Diambil

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui sumber data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan pada saat proses penelitian berlangsung. Data ini didapat langsung dari sumbernya yaitu informan dengan wawancara mendalam dan observasi dengan cara menelusuri daerah pasar Sawahlunto.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang memperkuat data primer yang dapat diperoleh dari media yang dapat mendukung dan relevan dengan penelitian ini, serta dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian dan artikel. Data ini diperoleh dari pihak Perindagkpnaker Kota Sawahlunto, UPTD Pasar Sawahlunto, serta pihak Pengurus Pasar yang berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.



Tabel 1.2
Data yang Diambil

No	Tujuan Penelitian	Informan	Jenis Data	Alat Pengumpul Data
1	Mendeskripsikan pelemah kapital sosial dalam pengelolaan pasar Sawahlunto	- Dinas PERIDAGKOPNAKER -UPTD Pasar Sawahlunto -Pengurus Pasar -Pemilik yang tidak mengoperasikan tokonya	Primer dan Sekunder	Wawancara dan Literatur

Sumber: Data Primer tahun 2016

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik penumpulan data yang digunakan untuk data primer yaitu melalui observasi dan wawancara.

- Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data di lapangan dengan melihat dan mengamati secara cermat, agar dapat diambil data yang aktual dan nyata. Observasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan perilaku yang nyata dan wajar sehingga apa yang diharapkan dari tujuan penelitian ini benar-benar maksimal (Ritzer, 1992;74).

Observasi dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian dengan mengamati kondisi pasar Sawahlunto dimana terdapat keadaan banyaknya toko yang tidak dioperasikan pemiliknya. Peneliti melakukan dengan cara pergi ke pasar blok B dan C. Peneliti duduk di pasar blok B dan C sekitar dua jam selama beberapa hari. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung tentang sepiunya pasar Sawahlunto karena banyaknya toko yang tidak dioperasikan.

Teknik observasi yang digunakan *participat as observer* yaitu dimana peneliti memberitahukan maksud dan tujuan penelitian kepada kelompok yang ingin diteliti (Ritzer, 1992:74). Teknik ini dilakukan secara keterbukaan guna mengembangkan hubungan baik peneliti dengan objek penelitian sehingga

diharapkan objek dapat memahami maksud peneliti dan memberikan keterangan secara sukarela dan kesempatan pada peneliti untuk mengamati secara langsung kondisi yang benar-benar terjadi. Terlebih dahulu peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti terhadap objek penelitian. Peneliti memperkenalkan diri dan setelah itu peneliti menjelaskan maksud peneliti. Setelah objek memahami dan mengizinkan peneliti untuk melakukan observasi, barulah peneliti mulai mengamati keadaan sekitar.

- Wawancara

Wawancara merupakan bagian yang sentral dalam penelitian. Tanpa wawancara, peneliti tidak akan memperoleh informasi yang penting. Wawancara yang dilakukan terhadap informan adalah wawancara mendalam, yaitu suatu wawancara tanpa alternatif jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Karena pewawancara perlu mendalami informasi dari seorang informan, maka wawancara mendalam kata Taylor (1987) dalam Afrizal (2014:136) perlu dilakukan berulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan. Pernyataan berulang-ulang kali tidak berarti mengulang pertanyaan yang sama dengan beberapa informan atau dengan informan yang sama. Berulangkali berarti menanyakan hal yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi informasi yang telah didapat dalam wawancara sebelumnya atau mendalami hal-hal yang muncul dalam wawancara yang telah dilakukan dengan seorang informan (Afrizal, 2014:136).



Wawancara dilakukan setelah adanya kesepakatan antara peneliti dan informan. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan peneliti sebelum melakukan kegiatan wawancara. Dalam wawancara ada hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, yaitu orang yang mewawancarai dan mereka yang diwawancarai, pewawancara bertugas memberikan pertanyaan kepada yang diwawancarai, begitupun mereka yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Wawancara bertujuan menggali dan menjangkau data sedalam, seluas dan sebanyak mungkin dengan menggunakan teknik wawancara mendalam.

Selanjutnya instrumen yang digunakan dalam wawancara mendalam adalah pedoman wawancara (*interview guide*), pedoman wawancara berupa daftar atau *draft* yang berupa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan pewawancara sebelum melakukan wawancara mendalam, daftar yang dibuat tentu harus sesuai dengan fokus dan topik yang ingin dicapai.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang tidak kaku dan lebih terkesan seperti wawancara biasa, hal ini merujuk dari kesan informal, kemudian peneliti mengingat, mendengar hasil rekaman dan menulis kembali hasil wawancara yang telah dilakukan tadi setibanya di rumah. Untuk itu terkadang peneliti sangat memerlukan bantuan alat perekam (*recorder*) untuk memperkuat hasil wawancara yang telah lalu dan menghindari peneliti dari sikap lupa.



Wawancara dilakukan untuk mengetahui pelemah kapital sosial dalam pengelolaan pasar dengan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat seperti dari pihak Pemerintah, Pengurus Pasar, serta pemegang IMK dengan menggunakan pedoman wawancara, kertas, pena dan alat perekam. Sedangkan observasi penulis lakukan hanya dengan menggunakan panca indera dalam pengambilan data yang ada dilapangan. Wawancara dilakukan sejak pertama kali saat peneliti melakukan survei awal.

Peneliti tidak sekali saja terjun ke lapangan, namun peneliti akan lebih sering terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat. Maka selama itu terjalin hubungan baik antara peneliti dengan informan. Wawancara yang dilakukan diusahakan santai dan menyenangkan mungkin, peneliti menghindari bentuk pertanyaan interogasi agar informan tetap merasa nyaman ketika diwawancarai.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki kriteria sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Yaitu pemegang IMK yang tidak mengoperasikan tokonya, Pengurus Pasar, serta pihak Pemerintah yang terkait seperti Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto dan UPTD Pasar Kota Sawahlunto.



1.6.6 Analisis dan Interpretasi Data

Miles dan Huberman (1992), dalam Afrizal (2014:178) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tahap tiga, kemudian kembali ke tahap satu. Dimulai dari *kodifikasi* data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Agar data dan informasi yang didapat lebih akurat, maka analisis ini dilakukan dengan teknik *Triangulasi*. *Triangulasi* berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi didapat dari tiga sumber. Prinsipnya adalah, informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias sebuah kelompok. *Triangulasi* dapat berarti adanya informasi-informasi yang berbeda atau adanya sumber data yang berbeda mengenai sesuatu (Afrizal, 2014:168). Artinya, pertanyaan yang diajukan merupakan pemeriksaan kembali atas kebenaran jawaban yang didapat dari informan. Teknik *Triangulasi* yang dilakukan adalah menanyakan informasi yang sama pada sumber yang lain atau pihak yang lain.



1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di daerah Sawahlunto, tepatnya di pasar Sawahlunto, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Pasar Sawahlunto merupakan salah satu pusat kota Sawahlunto. Terletak di Kecamatan Lembah Segar yang merupakan pusat dari Kota Sawahlunto.

Pasar Sawahlunto merupakan salah satu dari empat pasar tradisional di Kota Sawahlunto. Namun, pasar yang dijadikan lokasi penelitian adalah satu-satunya pasar yang ada di Kecamatan Lembah Segar. Pasar Sawahlunto merupakan salah satu lokasi yang dibenahi oleh Pemerintah Daerah Sawahlunto guna menunjang program menuju Kota Wisata yang Berbudaya.

1.6.8 Definisi Konsep

1. Pasar : Salah satu lembaga yang penting ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang didalamnya terdapat fenomena yang kompleks.
2. Pengelolaan : Adalah proses yang memberikan pengawasan, membina, menata, kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan untuk pencapaian tujuan tertentu.
3. Kapital Sosial : Berisikan tiga konsep inti yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma.
4. Kepercayaan : Hubungan antara dua pihak atau lebih yang didalamnya mengandung harapan yang menguntungkan kedua belah pihak.
5. Jaringan : ikatan antar simpul yang dihubungkan melalui media yaitu hubungan sosial yang diikat oleh kepercayaan dan dipertahankan oleh norma.
6. Norma : Berisikan aturan serta hak dan kewajiban.
7. Rehabilitasi : Kegiatan perbaikan aset tetap yaitu bangunan pasar Sawahlunto, dengan meningkatkan fasilitas dari yang sebelumnya.



8. Pasar Sawahlunto : Salah satu pasar yang ada di Kota Sawahlunto yang menjadi lokasi untuk melakukan penelitian bagi peneliti.
9. Pemerintah Pengelola Pasar : Instansi yang memberikan pengewasan, membina, menata, dalam pelaksanaan pembuatan peraturan serta penerapan peraturan dalam lingkungan pasar, yang dalam hal ini instansi tersebut yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pasar Kota Sawahlunto yang bekerja dibawah naungan Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto.
10. UPTD Pasar : Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pasar Kota Sawahlunto yang merupakan instansi yang langsung terjun mengelola pasar Kota Sawahlunto.
11. Pemilik Toko : Orang yang memiliki toko di Pasar Sawahlunto atau yang juga biasa disebut sebagai pemegang izin menempati kedai (IMK).

1.6.9 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun dari mulai penulisan perencanaan TOR. Maka jadwal penelitian dilakukan dari mulai Agustus 2015 hingga bulan Mei 2016. Adapun rincian mengenai jadwal penelitian tersaji dalam tabel 1.3 sebagai berikut:



Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan 2015					Pelaksanaan Kegiatan 2016					
		Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Survei awal dan TOR penelitian											
2	Mengusulkan TOR, menyerahkan ke jurusan sampai SK pembimbing keluar											
3	Bimbingan Proposal dengan dosen pembimbing I dan II sesuai dengan SK yang telah ditetapkan											
4	Ujian seminar proposal											
5	Perbaikan proposal											
6	Pengurusan surat izin penelitian											
7	Penelitian											
8	Analisis data											
9	Penulisan skripsi dan bimbingan dengan dosen pembimbing											
10	Ujian skripsi											

Sumber: Data Primer tahun 2015-2016